



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA TAMPULANG KECAMATAN JENAMAS
DAN DESA SUNGAI JAYA KECAMATAN DUSUN HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa;
 - b. bahwa penetapan batas Desa Tampulang dengan Desa Sungai Jaya telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Jenamas dengan Pemerintah Kecamatan Dusun Hilir berdasarkan Berita Acara Supervisi Batas Desa Sekaligus Batas Kecamatan Desa Tampulang Kecamatan Jenamas dengan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir tanggal 12 Juli 2021;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tampulang Kecamatan Jenamas dan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TAMPULANG KECAMATAN JENAMAS DENGAN DESA SUNGAI JAYA KECAMATAN DUSUN HILIR.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
4. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.
10. Kanal Proyek Pengembangan Lahan Gambut yang disingkat Kanal PLG adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut 1 (satu) juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

Desa Tampulang terletak pada koordinat $02^{\circ} 27' 16''$ LS dan $114^{\circ} 50' 32''$ BT

Batas Desa Tampulang meliputi :

- a. Batas Utara : Desa Rangka Ilung
- b. Batas Barat : Desa Sungai Jaya
- c. Batas Timur : Kelurahan Rantau Kujang dan Desa Rantau Bahuang
- d. Batas Selatan : Desa Tabatan

dan Desa Sungai Jaya terletak pada koordinat $02^{\circ} 24' 09''$ LS dan $114^{\circ} 42' 01''$ BT

Batas Desa Sungai Jaya meliputi :

- a. Batas Utara : Desa Majahandau
- b. Batas Barat : Kabupaten Kapuas
- c. Batas Timur : Desa Tampulang
- d. Batas Selatan : Kabupaten Kapuas

Pasal 3

Batas Desa Tampulang Kecamatan Jenamas dengan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir dimulai dari :

- a. As Kanal D3 yang ditandai oleh PABU-1 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 35.19''$ LS dan $114^{\circ} 46' 12.99''$ BT;
- b. PABU-1 selanjutnya mengarah ke Tenggara sampai pada As Sungai Sambu di Kanal D3 yang ditandai oleh PBU-1 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 18.92''$ LS dan $114^{\circ} 48' 13.68''$ BT;
- c. PBU-1 selanjutnya mengarah ke Timur sampai pada As Sungai Sambu yang ditandai dengan TK -1 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 18.3''$ LS dan $114^{\circ} 48' 15.8''$ BT; dan
- d. TK-1 selanjutnya mengarah ke Timur Laut sampai pada As Kanal PLG yang ditandai oleh PABU-2 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 36.26''$ LS dan $114^{\circ} 51' 47.41''$ BT yang juga pertigaan batas Desa Tampulang, Desa Rangka Ilung Kecamatan Jenamas dan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir.

Pasal 4

PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan nama Desa, penggabungan dan atau pemekaran Desa, perubahan status Desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Batas Desa dan koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimuat dalam Peta Batas Desa Tampulang Kecamatan Jenamas dengan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III

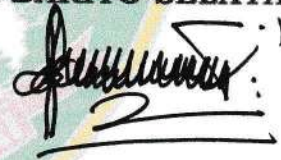
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 Desember 2021

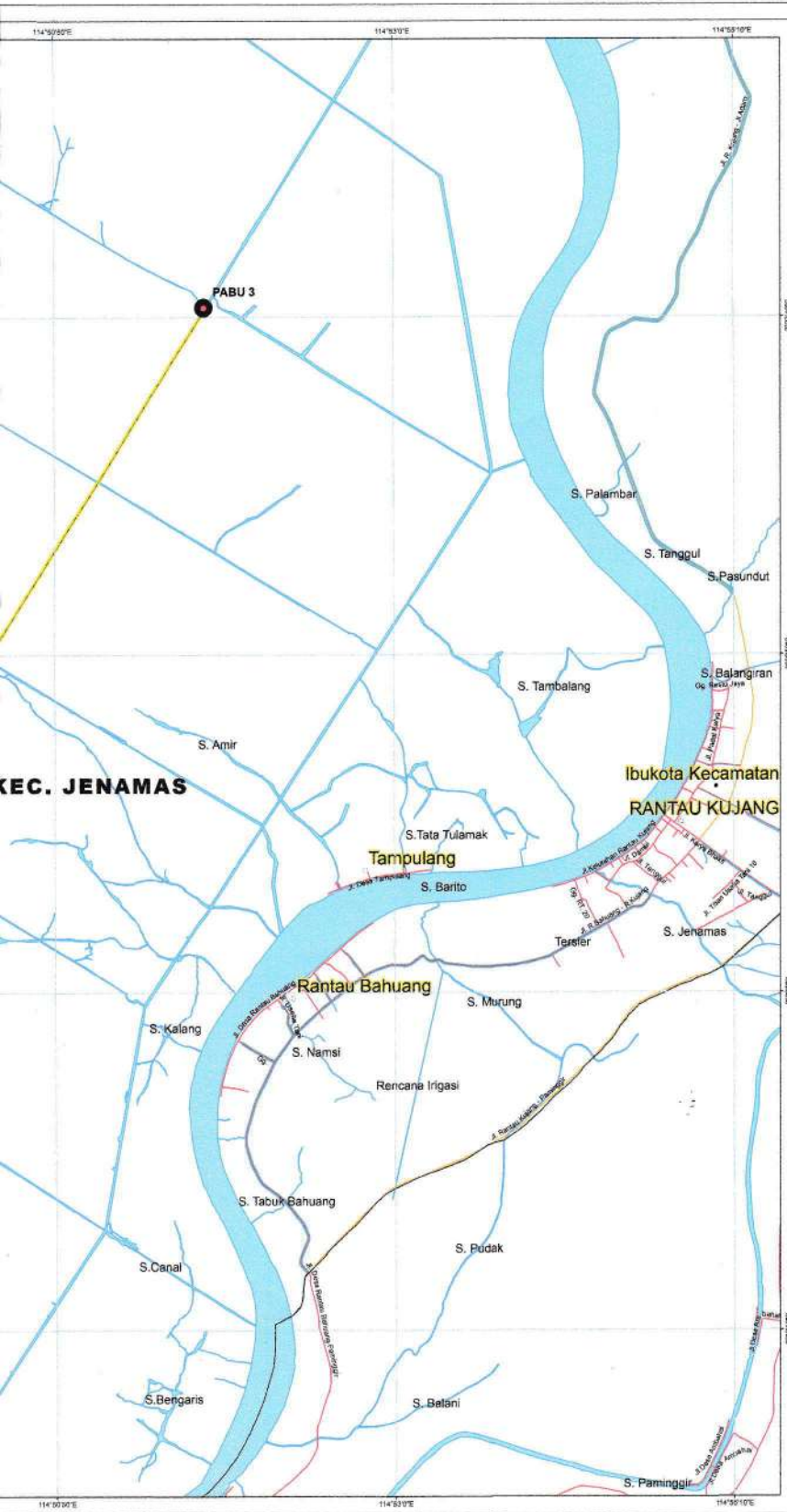
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

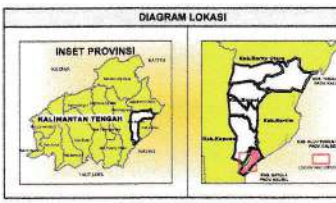
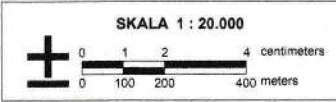
**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 32**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 54 TAHUN 2021
 TENTANG
 BATAS DESA TAMPULANG
 DENGAN DESA SEI JAYA
 KECAMATAN JENAMAS
 KABUPATEN BARITO SELATAN



Lembar Peta :
 Tampulang : 62.04.01.2001 dan Sei Jaya : 62.04.02.2001

DESA TAMPULANG DENGAN DESA SEI JAYA
 KECAMATAN JENAMAS
 KABUPATEN BARITO SELATAN



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Ellipsoid : Datum WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Pella Raya Nomor 305 F. Telepon (0820) 21001. Faksimile (0820) 21500
 Website : www.baritosekarangkab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
 Kalimantan Tengah

KETERANGAN

Kota / Permukiman	Batas Administrasi
● Ibukota Kabupaten	— Batas Provinsi
● Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten
○ Kampung	— Batas Kecamatan
Jaringan Jalan	Perairan
— JKP - 1	— Sungai
— JKP - 2	— Danau
— Jalan Lokal Primer	
— Jalan Lokal	
Pilar Batas	
● Titik Batas Desa Tampulang Dengan Desa Sei Jaya	
Garis Batas Desa	
— Garis Batas Desa Tampulang Dengan Desa Sei Jaya	

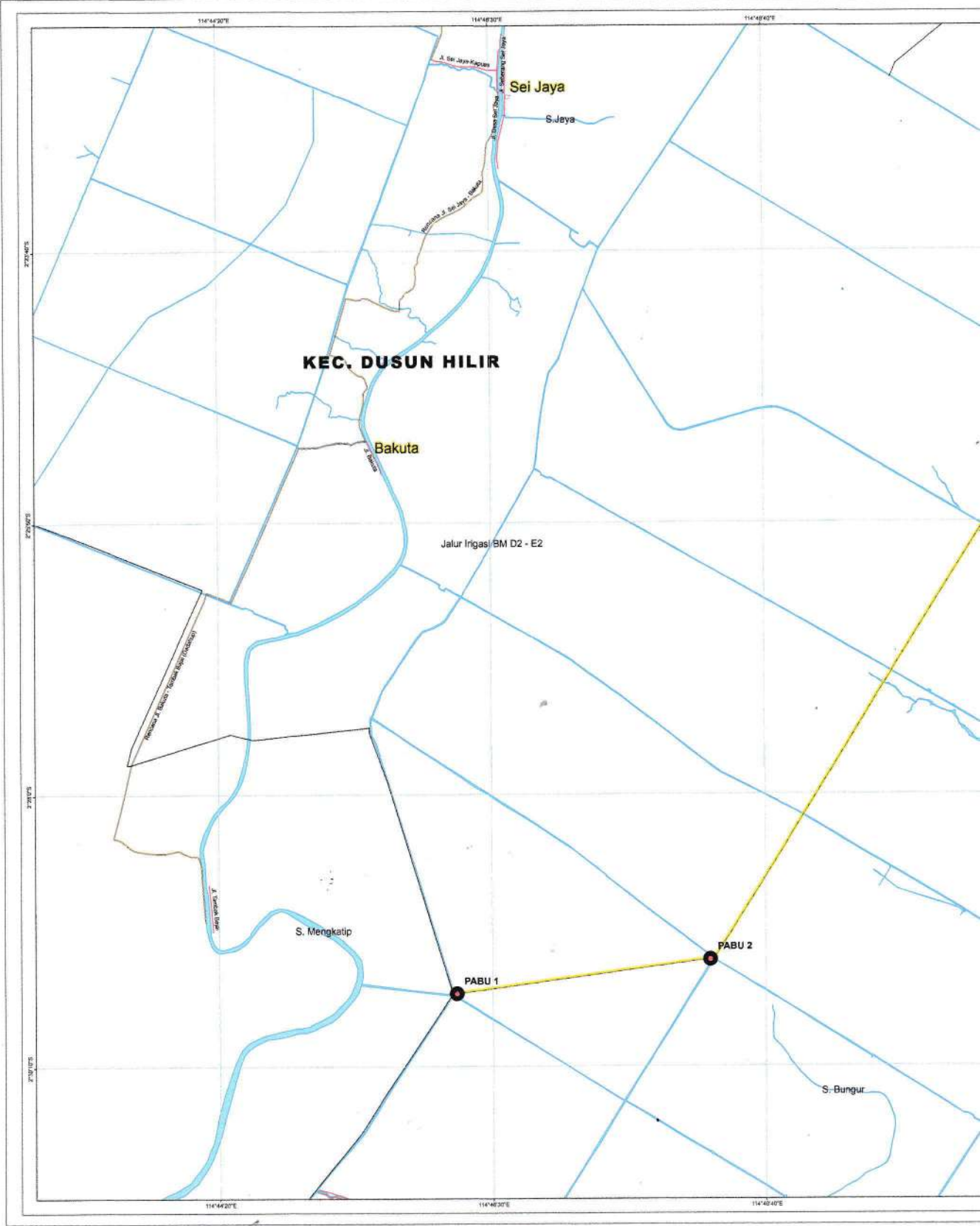
DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS
 DESA TAMPULANG DENGAN DESA SEI JAYA
 KECAMATAN JENAMAS
 KABUPATEN BARITO SELATAN

PILAR	NAMA TITIK PILAR	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEODASIS	
		X	Y	URUTANG	Bujur
PABU 1	AS KANAL D3	232058	9794205	279°35.19' LS	114°48'12.99" BT
PABU 2	SUNDAI SAMBU KANAL D3	235787	9742731	279°38.92' LS	114°48'13.02" BT
PABU 3	AS KANAL P10	262375	9793270	279°36.26' LS	114°51'47.41" BT

SUMBER PETA:
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 BIC Edisi Tahun 1961 - 2013 - 2016
 diperbaharui dengan Ciba Spel 6 / 7 Tahun 2017 - 2018 - 2019
 - Peta Laminiran Peta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2034
 - Peta Permendagri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kab. Beraul Prok. Kallang
 dengan Kab. Buntok Prok. Kallang, Permendagri Nomor 37 tahun 2017 tentang Batas Daerah
 Kab. Kaulas dengan Kab. Beraul dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Batas
 Daerah Kab. Barim Dengan Kab. Beraul Prok. Kallang dan Garis Batas Kepegangan Kab. Beraul
 Prok. Kallang dengan Kab. Huk. Sungai Uluha Prok. Kallang

BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI



KEC. DUSUN HILIR

Sei Jaya

S. Jaya

Bakuta

Jalur Irigasi SM D2 - E2

S. Mengkatip

PABU 2

PABU 1

S. Bungur

114°42'0"E 114°43'0"E 114°44'0"E

2°10'0"S 2°11'0"S 2°12'0"S

114°42'0"E 114°43'0"E 114°44'0"E